

PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM, DAN SPI PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

I Wayan Karsana¹
I Gusti Ngurah Agung Suaryana²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: iwarsana17@gmail.com/telp: +62 83117302340

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya masyarakat. Laporan keuangan yang berkualitas haruslah memenuhi karakteristik kualitatif yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Secara umum, kualitas suatu laporan keuangan diukur berdasarkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Menurut opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangli, masih terdapat kelemahan dibidang penerapan standar akuntansi keuangan, sumber daya manusia, dan sisitem pengendalian intern. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan sisitem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangli. Penelitian ini dilakukan pada 30 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *survey* dengan kuisioner. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan di masing – masing perangkat daerah yang berjumlah 38 orang. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan

Kata Kunci: laporan keuangan, SAP, SDM, SPI

ABSTRACT

Financial statements is one of the government's reposibility form for managemented the society resources. The Financial Statement wich has quality shall be satisfy the qualitative characteristics that is reliable, relevant, comparable and understandable. Generally, the quality of he financial statements measured by opinion of Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia / BPK RI). Base on the opinion of BPK RI for financial statements of Bangli Regency, there are still the weakness in apply the Financial Accounting Standars (SAP), human reasources, and interna control system. This study aims to exmine and obtail the empirical evidence of effect effectiveness of govermental accouting standars, competence of human resources, and internal control system on the financial statements quality of Bangli Regency. This study was conducted at Bangli regency government through 30 Regional Devices (Perangkat Daerah / PD) in Bangli Regency. The methods to collect data using survey methods by questionnaire. The sample of this study are head of financial subsection and head of planning subsection in every Regional Devices which amounts to 38 persons. The method of determining the sample of this study using purposive sampling method. The analyze methodData of this study has ananlized by

Linear Regression Analysis technique. Base on the result analysis it known that effect effectiveness of governmental accounting standars, competence of human resources, and internal control system have a positive effect on quality of financial statements. .

Keywords: *Finnancial reports, GAS, HR, ICS*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di laksanakan dengan pemberian hak kepada daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan daerah mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan. Otonomi daerah akan membuat daerah berusahasecara bertahap untuk menjadi mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan pada pusat. Kemandirian daerah otonom sebagai tujuan dilaksanakannya otonomi daerah juga harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable* dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Azlim dan Bakar, 2012). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas wewenang yang telah diberikan diatur dalam Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu dalam bentuk Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Di sektor publik, laporan keuangan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah atas segala yang dilakukan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari dana publik .

Dana publik yang dimaksud adalah dana yang berasal dari masyarakat, misalnya pajak, retribusi dan pendapatan lainnya yang sah. Dana publik atau dana masyarakat ini memerlukan suatu pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan agar pengelolaan keuangan rakyat oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawabannya sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaannya (Ristanti dkk, 2014). Pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan yang dilakukan disajikan dalam Laporan Keuangan yang terdiri dari 7 jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010).

Laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi yang memiliki karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan tujuan dari organisasi sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan. Selain sebagai pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan, laporan keuangan juga merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah mengenai apa yang telah dikerjakan selama 1 tahun. Seperti yang diungkapkan Sari (2014), Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang berkualitas juga tercermin dari

pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Di Provinsi Bali, untuk Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2015, hanya Kabupaten Bangli yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diantara entitas pemerintah lain yang berada di Bali. Berikut opini BPK atas Laporan Keuangan entitas di Provinsi Bali untuk Laporan Keuangan tahun 2015 yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Opini BPK untuk Laporan Keuangan Entitas Tahun 2015 di Provinsi Bali.

Entitas Pemerintah Daerah	Pendapat BPK
Provinsi Bali	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Kabupaten Badung	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Kabupaten Bangli	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Kabupaten Buleleng	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Kabupaten Gianyar	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Kabupaten Jembrana	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Kabupaten Karangasem	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Kabupaten Klungkung	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Kabupaten Tabanan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Kota Denpasar	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Bangli yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diantara entitas pemerintah yang lain untuk laporan keuangan tahun 2015. Pemberian opini wajar dengan pengecualian oleh BPK didasarkan pada beberapa hal yaitu : 1) Pemerintah Kabupaten Bangli telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, namun kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara memadai dan belum mengatur mengenai penambahan masa manfaat yang berasal dari pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan Aset Tetap. 2) Pokok - pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Kabupaten

Bangli yang ditemukan BPK adalah, antara lain Pemerintah Kabupaten Bangli belum melakukan verifikasi dan validasi data piutang pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) dan pengelolaan aset tetap milik pemerintah Kabupaten Bangli belum tertib. 3) BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Pemerintah Kabupaten Bangli. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan tersebut adalah Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas serta Jasa Giro rekening Puskesmas terlambat disetor ke Kas Daerah dan Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp.75.702.100,00 kepada pegawai yang telah pensiun.

Kebijakan tentang aset tetap yang belum memadai akan menyebabkan kualitas laporan keuangan menjadi kurang maksimal dan hal itu mencerminkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan belum efektif. Hal ini seharusnya tidak terjadi mengingat bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tahun 2010 dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual (Ningtyas, 2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara efektif, akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumah (2012), Putra & Amar (2015) dan

Ningtyas (2015) yang menyatakan bahwa efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber daya manusia diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan tujuan organisasi sektor publik. Pemerintah Daerah memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Juita (2013) sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan bahwa sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan – pelatihan agar mampu meningkatkan kompetensinya. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang memadai akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wati,dkk (2014), Rama & Putra (2014), Surastiani (2015) yang menyatakan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Tingginya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki Institusi Pemerintah Daerah. Sistem pengendalian intern didefinisikan oleh (Abiola *et al.* 2013) sebagai tindakan yang dilakukan pada keuangan dan non-keuangan untuk memastikan perlindungan aset, deteksi dan pencegahan penipuan, memenuhi persyaratan dan prosedur kebijakan internal kontrol dan akurasi kelengkapan catatan. Pengendalian juga harus dilakukan secara berkala, sehingga apabila ada

kesalahan agar segera dapat diperbaiki. Pengendalian intern yang baik akan membuat kinerja pemerintah menjadi optimal sehingga akan mampu mencapai segala tujuan yang telah ditetapkan sehingga lebih mudah untuk tercapainya transparansi di lingkungan pemerintah. Semakin baik pengendalian intern suatu entitas tentu akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dikarenakan segala sesuatunya dapat diawasi sehingga tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiranayanti & Erawati (2016), Cornelia, dkk (2016) serta Putri & Nurhayati (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk berbagai alasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli”.

Berdasarkan pemaparan diatas, pokok permasalahan diambil penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangli? 2) Bagaimanakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangli?. 3) Bagaimanakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangli?

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menguji secara

empiris pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah . 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah. 3) Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut: 1) Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat teori keagenan yang terjadi di sektor publik khususnya pemerintah daerah bahwa *agent* yaitu pemerintah daerah memiliki kontrak untuk melaksanakan penyelenggaraan Negara yang bersih dan beretika yang tercermin dalam laporan keuangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat (*principal*) dalam pengambilan keputusan serta dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah. 2) Kegunaan Praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi jajaran pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli agar kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangli dapat ditingkatkan. Meningkatnya kualitas laporan keuangan akan membawa dampak positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

Teori Keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) dengan pemilik entitas (*principal*) berupa pemberian wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan terbaik, sedangkan *agent* melakukan jasa untuk dan atas nama *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan telah terjadi pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terjadinya masalah keagenan ditimbulkan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah (*agent*) dengan DPR (*principal*). DPR memiliki kepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas dari pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah atas wewenang yang telah diberikan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan diukur berdasarkan 4 prasyarat normatif suatu laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu :

- 1) relevan, suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila suatu laporan keuangan mampu memengaruhi keputusan penggunaannya dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan.
- 2) andal, suatu laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila isi suatu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.
- 3) dapat dibandingkan, suatu laporan keuangan dikatakan dapat dibandingkan apabila suatu laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode yang sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan suatu laporan keuangan dengan laporan keuangan lain dapat dilakukan apabila menerapkan kebijakan yang sama.
- 4) dapat dipahami, suatu

laporan keuangan dikatakan dapat dipahami apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna demi kemudahan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat disusun dan disajikan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif. Suatu sistem dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan oleh suatu orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Nurlaila, 2014). Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman seharusnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga terjadi keefektivan didalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi apabila diterapkan secara efektif, akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah yang lebih baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik (Putra & Amar, 2015). Cornelia dkk. (2016) menyatakan bahwa efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

H₁: Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan penunjang dalam terlaksananya pemerintahan yang baik. Menurut Andini (2015) Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga Pegawai

Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik tentu akan mampu bekerja secara optimal sehingga segala tujuan dari pemerintah daerah dapat tercapai, salah satunya menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan DPR selaku *principal* dalam hal menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dapat terwujud melalui sumber daya manusia yang kompeten. Kualitas informasi di dalam laporan keuangan yang buruk akan mempersulit pengguna di dalam mengambil keputusan. Selain itu, kualitas laporan yang buruk sebagai akibat dari rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai di instansi pemerintah tersebut akan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Megawati dkk (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H₂: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah yang terlihat dari nilai informasi laporan keuangan (Armando, 2013). PP No. 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan Negara dapat dilaporkan secara andal, aset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mulyani & Suryawati, 2013). Laporan keuangan yang berkualitas merupakan kebutuhan dari DPR selaku *principal*. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, system pengendalian intern pemerintah harus memadai. Adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka segala kegiatan terutama dibidang keuangan akan berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dewi (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H₃: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif dengan tipe kausalitas. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bangli berjumlah 30 unit yang terdiri dari 2 Sekretariat, 1

Inspektorat, 17 Dinas, 5 Badan, 4 Kecamatan, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Lokasi penelitian dipilih di KAbupaten Bangli karena laporan keuangan kabupaten Bangli merupakan satu-satunya laporan keuangan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian di Provinsi Bali untuk tahun 2015. Obyek penelitian pada penelitian ini yakni mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bangli.

Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 2 antara lain :1) Variabel independen, yakni variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2014:59). Penelitian ini variabel independennya adalah efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1), kompetensi sumber daya manusia (X_2), dan system pengendalian intern (X_3). 2) Variabel dependen, yakni variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Penelitian ini variable dependennya adalah kualitas laporan keuangan (Y)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, merupakan data yang berupa angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2014:14). Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari skor dari jawaban responden terhadap kuisisioner yang terkumpul. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian perencanaan perangkat daerah Kabupaten Bangli. Pemilihan kepala sub bagian sebagai populasi bertujuan untuk memperoleh informasi secara teknis karena kepala sub bagian keuangan yang secara langsung terlibat didalam penyusunan laporan

keuangan pemerintah dan kepala sub bagian perencanaan yang secara langsung terlibat didalam penyusunan anggaran pemerintah.

Pemilihan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sample yang representatif yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:122). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun menjabat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey* menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarakan langsung kepada responden berupa pertanyaan dan pernyataan tertulis mengenai pengaruh efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Bangli. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada 30 Perangkat Daerah di Kabupaten Bangli. Responden pada penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan di masing – masing perangkat daerah. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner yang dikirim oleh peneliti ke seluruh Perangkat Daerah. Berikut adalah ringkasan pengiriman dan pengambilan kuesioner.

Tabel 2.
Rincian Pengiriman dan Pengambilan Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang tersebar	38	100
Kuesioner yang kembali	36	94,74
Kuesioner yang tidak kembali	2	5,26
Kuesioner yang digunakan	36	94,74
Response rate	$36/38 \times 100\% =$	94,74%
Usable respon rate	$2/38 \times 100\% =$	5,26%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel 2 menunjukkan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 38 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 36 kuesioner dan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 2 kuesioner dengan alasan kuisisioner hasil penelitian tidak ditemukan. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa 36 responden yang memenuhi kriteria sebagai sampel yaitu pejabat atau pegawai yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun menjabat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36 responden.

Analisis statistik deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu data pada variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif dilihat berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2013:43).

Tabel 3.
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	36	13.64	31.30	24.0672	4.85061
X1	36	24.44	55.70	40.9747	7.58266
X2	36	7.44	22.87	16.9961	3.66525
X3	36	5.00	22.63	12.4006	3.63219
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa skor rata-rata kualitas laporan keuangan sebesar 24,0672 lebih mendekati nilai Maximum yaitu 31,30 yang berarti kualitas laporan keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Bangli adalah cukup baik. Skor rata-rata efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 40,9747 lebih mendekati nilai Maximum yaitu 55,70 yang berarti bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Perangkat Daerah Kabupaten Bangli sudah cukup baik. Skor rata-rata kompetensi sumber daya manusia sebesar 16,9961 lebih mendekati nilai Maximum yaitu 22,87 yang berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia di Perangkat Daerah Kabupaten Bangli cukup baik. Skor rata-rata sistem pengendalian intern sebesar 12,4006 lebih mendekati nilai Minimum yaitu 5,00 yang berarti bahwa sistem pengendalian intern di Perangkat Daerah Kabupaten Bangli kurang baik

Pengujian instrumen yang dilaksanakan dalam penelitian ini ialah uji reliabilitas dan uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen yang digunakan. Hasil uji validitas ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas Instrumen

No.	Variabel	Kode Instrumen	Nilai <i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
1	Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁)	X ₁ 1	0,761	Valid
		X ₁ 2	0,727	Valid
		X ₁ 3	0,701	Valid
		X ₁ 4	0,446	Valid
		X ₁ 5	0,675	Valid
		X ₁ 6	0,551	Valid
		X ₁ 7	0,725	Valid
		X ₁ 8	0,726	Valid
		X ₁ 9	0,562	Valid
		X ₁ 10	0,447	Valid
		X ₁ 11	0,644	Valid
		X ₁ 12	0,510	Valid
		X ₁ 13	0,642	Valid

		X ₁ 14	0,765	Valid
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₂)	X ₂ 1	0,562	Valid
		X ₂ 2	0,518	Valid
		X ₂ 3	0,833	Valid
		X ₂ 4	0,773	Valid
		X ₂ 5	0,855	Valid
		X ₂ 6	0,692	Valid
3	Sistem Pengendalian Intern (X ₃)	X ₃ 1	0,729	Valid
		X ₃ 2	0,721	Valid
		X ₃ 3	0,846	Valid
		X ₃ 4	0,762	Valid
		X ₃ 5	0,880	Valid
	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y1	0,786	Valid
		Y2	0,685	Valid
		Y3	0,638	Valid
		Y4	0,566	Valid
		Y5	0,717	Valid
		Y6	0,798	Valid
		Y7	0,643	Valid
		Y8	0,781	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 4 maka dapat disimpulkan bahwa tiap butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Pearson Correlation* tiap instrumen pernyataan yang dihasilkan dari uji validitas $> 0,30$.

Pengujian instrumen yakni uji reliabilitas dilaksanakan untuk mengetahui kehandalan instrumen penelitian. Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Instrumen yang digunakan dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,7$. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1)	0,886	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2)	0,800	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X_3)	0,848	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,853	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai keseluruhan *cornbach's alpha* > 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini reliabel dan dapat digunakan. Uji asumsi klasik yakni uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, yaitu jika koefisien *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (5%) maka dapat dikatakan bahwa data populasi memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan dalam Tabel 6 berikut. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahuibahwa nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,890 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji asumsi klasik yakni uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi satu pengamatan ke pengamatan lain yang dilakukan dengan uji Glejser. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai signifikansi melebihi 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian ini dapat dikatakan tidak ada indikasi heterokedastisitas.

Uji asumsi klasik yakni uji multikolinieritas digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas melalui besaran koefisien korelasi (r) yang bebas dari gejala multikolinier. Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar sesama variabel bebas dapat dilihat dari nilai *tolerance* (a), dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai $alpha/tolerance$ lebih dari 10% atau 0,10 atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai nilai VIF kurang dari 10 sehingga tidak terjadi multikoleniaritas.

Uji kelayakan model (uji F) bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linear berganda sebagai alat prediksi yang menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan fenomena dari variabel dependen. Bila nilai signifikansi F atau *Probabilities value* $< \alpha = 0,05$ maka model ini dikatakan layak atau variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Tabel 6.
Hasil Uji F (Uji Kelayakan Model)

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	685.350	3	228.450	52.919	.000 ^a
	Residual	138.144	32	4.317		
	Total	823.494	35			

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000. Nilai 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) yang memiliki arti bahwa model regresi yang digunakan layak untuk memprediksi pengaruh variabel independen dan variabel kontrol pada variabel dependen.

Tabel 7.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912 ^a	.832	.817	2.07774

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,817 artinya 81,7 persen variansi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel bebas (efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern), sedangkan sisanya 18,3 persen kualitas laporan keuangandijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 8.
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.066	2.022		.527	.602
	X1	.175	.059	..274	2.991	.005
	X2	.674	.148	.510	4.559	.000
	X3	.351	.137	.263	2.568	.015

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui hasil yang diperoleh dari nilai signifikansi uji-t untuk variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) sebesar 0,005 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien regresi 0,175. Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan (H_1 diterima). Hasil yang diperoleh dari nilai signifikansi uji-t untuk variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,000 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien regresi 0,674. Hasil pengujian tersebut

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan (H_2 diterima). Hasil yang diperoleh dari nilai signifikansi uji-t untuk variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,015 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,351. Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan (H_3 diterima)

Tabel 9.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.066	2.022	.527	.602	
	X1	.175	.059	..274	2.991	.005
	X2	.674	.148	.510	4.559	.000
	X3	.351	.137	.263	2.568	.015

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 9 maka persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 1.066 + 0,175X_1 + 0,674X_2 + 0,351X_3 + \varepsilon$$

Interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah Nilai konstanta sebesar 1,066 menunjukkan jika efektivitas penerapan standard akuntansi pemerintahan (X_1), kompetensi sumber daya manusia (X_2) dan sistem pengendalian intern (X_3), tidak ada atau bernilai nol, maka besarnya kualitas laporan keuangan adalah sebesar 1,066 satuan. Nilai koefisien $\beta_1 = 0,175$ menunjukkan jika efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,175 dengan asumsi variabel independen dan kontrol lainnya konstan. Nilai koefisien $\beta_2 = 0,674$ menunjukkan jika kompetensi sumber daya manusia (X_2)

mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan(Y) sebesar 0,674 dengan asumsi variabel independen dan kontrol lainnya konstan. Nilai koefisien $\beta_3 = 0,351$ menunjukkan jika sistem pengendalian intern (X_3) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan(Y) sebesar 0,351 dengan asumsi variabel independen dan kontrol lainnya konstan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, diketahui bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki koefisien regresi 0,175 dengan t hitung sebesar 2.991 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2015) yang menyebutkan efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, diketahui masih kurang efektifnya penerapan standar akuntansi pemerintahan terutama dalam hal pengakuan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berkaitan dengan Teori Keagenan. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah selaku *agent* harus memenuhi kebutuhan masyarakat selaku *principal* yang diwakili oleh DPR dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas agar memudahkan *principal* dalam mengambil keputusan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan secara efektif,

memudahkan pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan karena standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman didalam penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki koefisien regresi 0,674 dengan t hitung sebesar 4,559 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita (2010), Mahaputra (2014), dan Surastiani (2015) yang menyebutkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, diketahui masih rendahnya sumber daya manusia bagian keuangan jurusan akuntansi yang dimiliki oleh perangkat daerah Kabupaten Bangli. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semakin kompeten sumber daya manusia yang dimiliki maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh Teori Keagenan. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah selaku *agent* harus memenuhi kebutuhan masyarakat selaku *principal* yang diwakili oleh DPR dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas agar memudahkan *principal* dalam mengambil keputusan. Sumber daya yang kompeten akan memudahkan pemerintah daerah dalam penerapan standar

akuntansi pemerintahan sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, diketahui bahwa sistem pengendalian intern memiliki koefisien regresi 0,351 dengan t hitung sebesar 2,568 dan nilai signifikansi sebesar 0,015 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti (2016), Pradipa (2016), dan Agustiawan (2016) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, diketahui masih sangat rendahnya sistem pengendalian intern dalam pembuatan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian intern dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas berkaitan dengan Teori Keagenan. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah selaku *agent* harus memenuhi kebutuhan masyarakat selaku *principal* yang diwakili oleh DPR dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas agar memudahkan *principal* dalam mengambil keputusan. Sistem pengendalian intern yang baik akan memudahkan tercapainya segala tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah salah satunya yaitu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terbukti berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. 2) Kompetensi sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. 3) Sistem pengendalian intern terbukti berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat disampaikan terkait penelitian yaitu bagi Perangkat Daerah Kabupaten Bangli agar menerapkan standar akuntansi pemerintah secara lebih efektif terutama mengenai pengakuan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Kompetensi sumber daya manusia juga harus ditingkatkan terutama dalam hal peningkatan sumber daya manusia bagian keuangan. Peningkatan dibidang sistem pengendalian intern juga sangat penting mengingat masih rendahnya sistem pengendalian intern terutama dalam hal pembuatan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan.

REFERENSI

- Abiola, I., & Oyewole, A. T. 2013. Internal control system on fraud detection: Nigeria experience. *Journal of Accounting and Finance*, 13(5), pp: 137.
- Andini, D. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat

- Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24(1), pp: 65-82.
- Armando, G. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukit tinggi). *Jurnal Akuntansi*, 1(1). pp: 19
- Azlim, D., & Bakar, U. A. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 1(1), pp: 1-14
- Cornelia, K. R. D., Yuniarta, G. A., AK, S., Edy Sujana, S. E., & Msi, A. K. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas - Dinas Se-Kabupaten Klungkung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah)*, 4(1), pp: 22-35
- Dewi, K. S., Cipta, W., & Bagia, I. W. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *Jurnal Jurusan Manajemen*, 2(1), pp: 34
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro. Hal 97-229.
- Jensen, M. C. & W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3(4), 305–360
- Juita, S. D. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3), pp : 25
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), pp:1290-1318
- Kusumah, A. A. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), pp: 54
- Megawati, L. K. S., Sulindawati, N. L. G. E., SE Ak, M., Edy Sujana, S. E., & Msi, A. K. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

- Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, 3(1), pp: 67
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. 2013. Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3.P/PP No. 60 Tahun 2008) dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 13(5), pp: 102-116.
- Ningtyas, P. E. 2016. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(1), pp: 454-488
- Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*. 3(1), pp: 23-27
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Putra, B. D., & Amar, S. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik*, 3(1), pp:234-256
- Putri, R., Fadilah, S., & Nurhayati, N. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya).*Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung
- Rama Mahaputra, I., & Putra, I. W. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2), pp: 230-244.
- Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., Edy Sujana, S. E., & Msi, A. K. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, 2(1), pp: 1-11

Sari, E. N. 2014. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 12(2), pp: 233-289

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), pp: 122-167

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Bali: Pemerintah Republik Indonesia

Wati, K. D., Herawati, N. T., AK, S., & Sinarwati, N. K. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, 2(1), pp: 675-688